Kemenkes BKK Bandung

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

BKK KELAS I BANDUNG TAHUN 2026



Alamat.
Jl. Cikapayang No.5, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116,
Telp. (022) 4219305
balaikarkesbandung@kemkes.go.id

Disusun oleh: Nurul Afifa, S.Si.T., M.Keb., MH.Kes.
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK JUARA DONG!

Kemenkes BKK Bandung

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



Latar Belakang

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan layanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan layanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebagai unit penyelenggara layanan pubilk telah menyelenggarakan FKP sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat dan stakeholder guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan FKP tahun 2026 ini merupakan kali kedua yang telah membahas 3 (tiga) rancangan standar pelayanan dan tahun sebelumnya telah membahas 2 (dua) rancangan standar pelayanan, sehingga BKK Kelas I Bandung memiliki 5 (lima) rancangan standar pelayanan yang telah dibahas di FKP dari 38 standart pelayanan.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Menyamakan pemahaman antara BKK Kelas I Bandung dengan masyarakat mulai dari rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKK Kelas I Bandung.
2. Menghimpun aspirasi, harapan, informasi, dan masukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penerapan standartpelayanan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

Manfaat

Adapun manfaat penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini adalah dapat menyelaraskan kemampuan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebagai Penyelenggara layanan publik dengan harapan masyarakat (pengguna layanan/stakeholder/mitra) dan selanjutnya untuk melakukan mitigasi dampak kebijakan yang diambil.

bangga melayani bangsa · BerAKHLAK · JUARA DONG!

Kemenkes BKK Bandung



Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi kegiatan dialog, diskusi, pertukaran pendapat atau pemikiran secara partisipatif terkait penyusunan rancangan, penerapan dan dampak standar pelayanan, serta pengawasan dan evaluasi pelayanan publik antara BKK Kelas I Bandung (penyelenggara layanan publik) dengan masyarakat pengguna layanan/stakeholder/mitra.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Selas, 24 Februari 2026
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Badami Lantai 4
Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
Jl. Cikapayang No. 05 Kota Bandung

Peserta FKP

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu :

1. Kepala Dinas kesehatan Kota Bandung
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban
4. Para Ketua Tim Kerja di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
5. Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu
6. Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Palabuhanratu
7. Para Kepala Koordinator Wilayah Kerja di Lingkungan BKK Bandung
8. Pimpinan Agen Pelayaran di Wilayah Kerja BKK Bandung
9. Ketua Forum Komunikasi KBIHU Cimahi
10. Ketua Organisasi Masyarakat Sipil INSA
11. Ketua Organisasi Masyarakat Sipil ISAA
12. Pimpinan MQ FM
13. Praktisi / Ahli
14. Pengguna Layanan

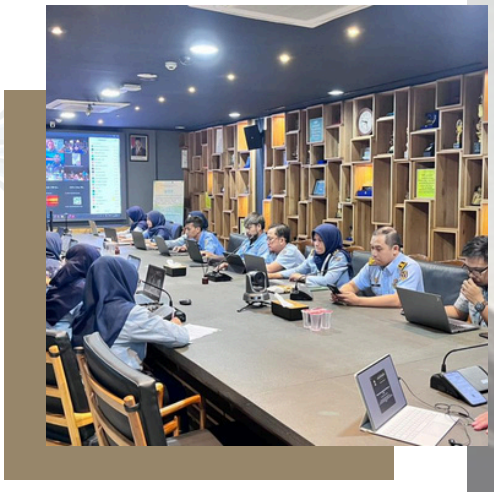

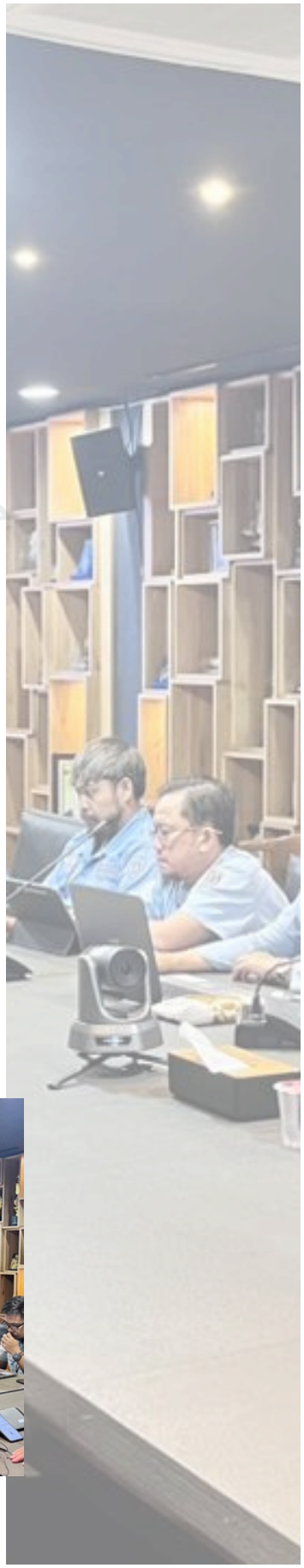

bangga melayani bangsa BerAKHLAK JUARA DONG!

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) secara daring dan luring, dimana BKK Kelas I Bandung sebagai narasumber dan mengundang ke 6 unsur yaitu antara lain:

1. Penyelenggara layanan
2. Pengguna layanan
3. Stakeholder/mitra pelayanan public
4. Ahli/praktisi
5. Organisasi Masyarakat Sipil
6. Media Massa



Pelaksanaan

Telah dilakukan rapat persiapan penyelenggaraan FKP pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026 dan membentuk tim penyelenggaraan FKP BKK Kelas I Bandung tahun 2026. Adappun Panitia FKP sebabagai berikut:

Pembina : Fitri Mayawati, SKM
Ketua Pelaksana : Yanto Riyanto, S.Kep Ns
Sekertaris : Agistian Hermanto, S. Kep.Ns
Anggota : Nurul Afifa, M.Keb., MH.Kes
Rahmawati Jati Murwani
dr. Nadindra Madhyastha, M.M.
Dewi Patmawati, S.K.M.
Ayu Retno Setyowati
Gelar Jaya Suwandi, S.T
Tim Pemantau Standar Pelayanan BKK Kelas I Bandung

Pelaksanaan FKP tahun 2026 ini membahas 3 (tiga) standar pelayanan, yaitu sebagai berikut:

1. Standar pelayanan penerbitan dokumentasi sertifikat vaksinasi internasional ICV/E-ICV
2. Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan (ketiga) di embarkasi
3. Standar pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kakarantinaan kapal

Pada kegiatan FKP tahun 2026 telah dihadiri oleh 6 unsur Forum Konsultasi Publik, yaitu:

1. Penyelenggara layanan: 32 orang yang terdiri dari 3 orang sebagai narasumber dan 29 orang sebagai peserta
2. Pengguna layanan, yaitu:
   - dr. Airena Niza Nugroho
   - Ari Susanto, SE
3. Stakeholder/mitra pelayanan public: yaitu:
   - PT. Zio Jaya Bahari-Cirebon
   - PT. Bahari Tirta Jaya
   - Fanyzia Fajrianas Kautsar
   - Tina Marcella
   - M. Latif
   - Eko Riyanto, S.A.B
   - Ajie Saka
   - Windi Hapsari
   - Jhorgi R. Pratama
   - Arif Andito
   - Nyoto Saputra
   - Agus Sugiarto
   - Tri Wulnadari
   - Mulya Sasmita
   - Muhammad Aly Imron
   - Dudy Darmawan
   - Dede Sumama
   - Dinda
   - Nyoto Saputra
   - Sigit Rahmat Raharjo
   - Muhyidin
   - Imam Solikin
   - dr. Medi Nursasih
   - Aceng
   - Amri Yusri
4. Ahli/praktisi, yaitu:
   - dr. Lia Narulitcha, MM (sebagai ahli)
   - Liana Rica Mon Via, SKM, M.EPid (sebagai Praktisi)
   - Almira (sebagai Praktisi)
5. Organisasi Masyarakat Sipil, yaitu:
   - Fauzul Haq
   - Adhe Purnama
6. Media Massa, yaitu:
   - Fitria Fanisa



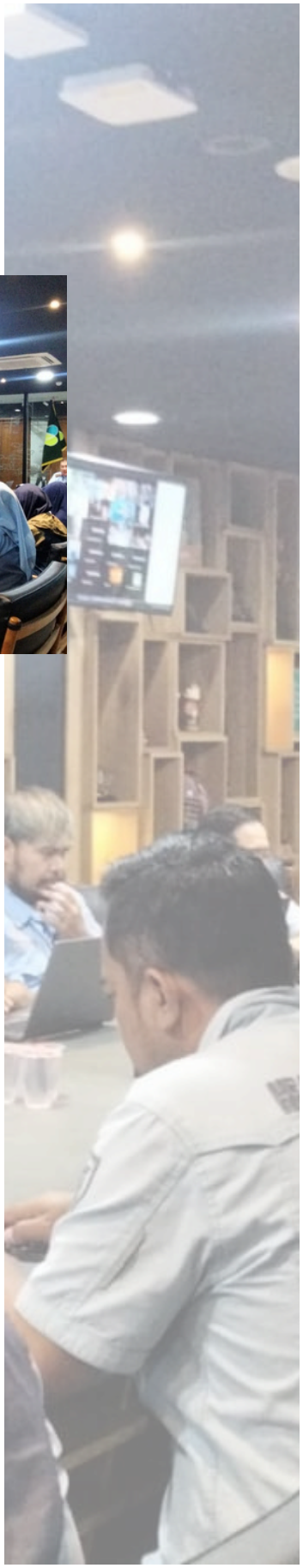

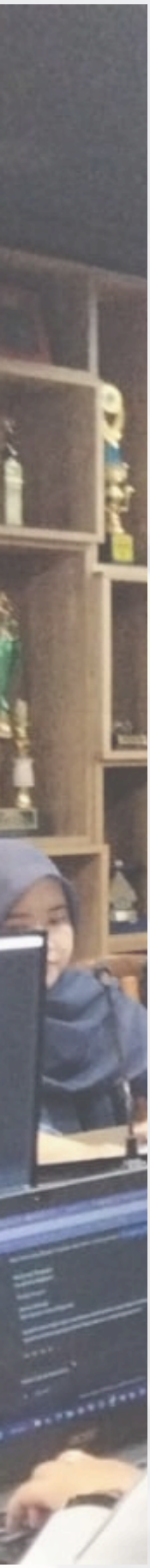

Hasil FKP

Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 BKK Kelas I Bandung diawali dengan sambutan Kepala BKK Kelas I Bandung dan doa, dilanjutkan tiga pemaparan rancangan standar pelayanan: (1) penerbitan sertifikat vaksinasi internasional ICV/e-ICV oleh Katimker 1 (Bapak Rifi Adi Sucipto, SKM, MKM), (2) pemeriksaan kesehatan (ketiga) di embarkasi oleh perwakilan Katimker 4 (dr. Ardina Cahyani), dan (3) penerbitan dokumen kesehatan kekarantinaan kapal oleh Katimker 2 (Bapak Triadi Anugrah, SKM).

Dalam sesi diskusi/FGD, teridentifikasi empat permasalahan utama beserta analisis dan tindak lanjutnya:

1. Penambahan waktu penentuan laik terbang Calon Jemaah Haji (CJH) di embarkasi
   - Analisis: Kebijakan one service dari Kementerian Haji dan Umroh di embarkasi asrama haji membatasi waktu petugas kesehatan PPIH embarkasi untuk memeriksa, mengawasi, memantau, dan memberikan tindakan (seperti transfusi darah), sehingga berisiko meloloskan CJH atau membatasi waktu penanganan.
   - Upaya Kepala BKK Kelas I Bandung: Mengoptimalkan pendampingan pra-embarkasi di Dinkes Kab/Kota dan memantau CJH hingga masuk embarkasi melalui koordinasi dengan Dinkes Kab/Kota.
2. Tidak adanya CJH cadangan (dan tidak adanya observasi CJH di embarkasi)
   - Analisis: Aturan Kementerian Haji dan Umroh tahun 2026 meniadakan CJH cadangan karena seluruhnya masuk kuota reguler, sehingga PPIH embarkasi harus bekerja ekstra menentukan laik terbang dan mencari pengganti dari kloter lain bagi CJH yang belum laik terbang saat keberangkatan.
   - Solusi/Upaya Kepala BKK Kelas I Bandung: Melakukan pendampingan pra-embarkasi di Kab/Kota dengan output rekomendasi by name bagi CJH yang butuh pengawasan ketat/pemeriksaan lanjutan (masih berjalan); merekomendasikan pembatalan bagi CJH berpenyakit kritis berat; mengatur istithaah berdasarkan penyakit; serta mengusulkan adanya kloter risiko tinggi (risti) agar waktu keberangkatan dan lama ibadah dapat disesuaikan.
3. Penambahan waktu pengumpulan laporan bulanan penerbitan e-ICV/ICV klinik
   - Analisis: Klinik menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM dan hari libur/tanggal merah.
   - Penyelesaian Kepala BKK Kelas I Bandung: Batas pengumpulan laporan bulanan tetap paling lambat tanggal 5 setiap bulan sesuai SE Direktorat SKK, karena BKK Kelas I Bandung wajib melaporkannya ke pusat setiap bulan.
4. Penambahan kuota e-ICV/ICV klinik dari BKK Kelas I Bandung
   - Analisis: Kuota yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan pengajuan klinik/RS.
   - Jawaban Kepala BKK Kelas I Bandung: BKK Kelas I Bandung memantau penerbitan melalui Aplikasi APIIK, sehingga penyesuaian kuota klinik/RS didasarkan pada realisasi ICV/e-ICV yang telah diterbitkan.



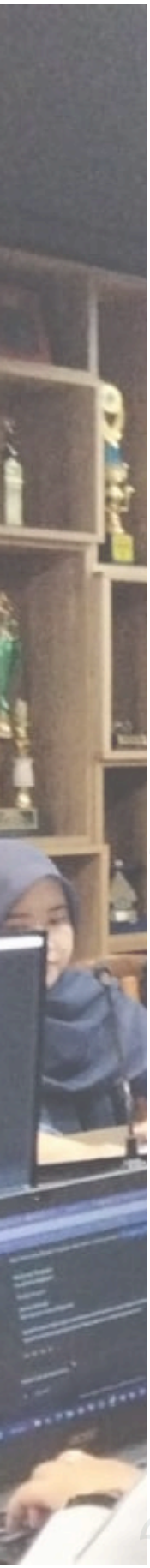

Hasil FKP

Untuk lebih jelasnya hasil dari FKP tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Berita Acara FKP Tahun 2026

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu penyelesaian
1	Perlunya penambahan waktu untuk penentuan kelaikan terbang calon Jemaah haji di embarkasi.	• Penambahan waktu observasi Jemaah haji di embarkasi • Pengoptimalan pendampingan pra embarkasi oleh petugas BKK Kelas I Bandung	Februari s/d Mei 2026
2	Tidak adanya calon jemaah haji cadangan	• Upayakan tidak ada calon jemaah haji yang batal berangkat • Pengoptimalan pendampingan pra embarkasi oleh petugas BKK Kelas I Bandung	Februari s/d Mei 2026
3	Kurangnya waktu dalam pengumpulan laporan bulanan penerbitan e-ICV/ICV klinik	• Penambahan waktu pengumpulan laporan bulanan • Pengumpulan laporan bulanan sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya karena harus melaporkan kepusat setiap bulannya	Sudah terselesaikan tanggal 24 Febriari 2026 saat FKP
4	Kurangnya kuota eICV/ICV klinik dari BKK Kelas I Bandung	• Penambahan kuota e-ICV/ICV untuk klinik • Peningkatan pemantauan aplikasi APIIK untuk memantau penerbitan e-ICV/ICV klinik	Sudah terselesaikan tanggal 24 Febriari 2026 saat FKP



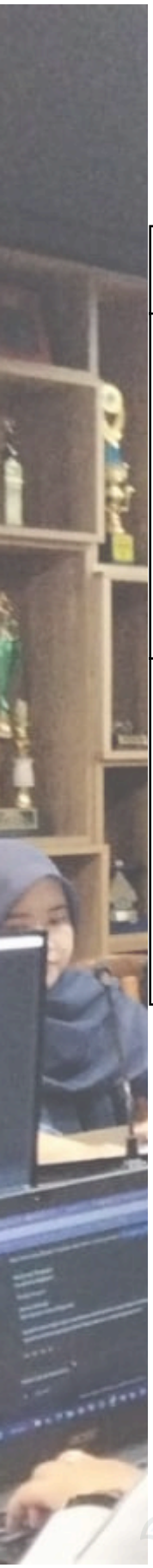

Rencana Aksi

Hasil FGD dalam FKP ini dilakukan identifikasi permasalahan yang muncul melalui analisis permasalahan. Selanjutnya dirumuskan rencana aksi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Rencana Aksi FKP Tahun 2026

No	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka Waktu penyelesaian
1	Perlunya penambahan waktu untuk penentuan kelaikkan terbang calon Jemaah haji di embarkasi.	• Mengoptimalkan kegiatan pendampingan pra embarkasi di dinkes kab/kota • Memberikan rekomendasi CJH yang memerlukan pengawasan ketat dan pemeriksaan lanjutan *by name*	Februari s/d Mei 2026
2	Tidak adanya calon jemaah haji cadangan	• Mengoptimalkan kegiatan pendampingan pra embarkasi di dinkes kab/kota • Memberikan rekomendasi CJH yang memerlukan pengawasan ketat dan pemeriksaan lanjutan *by name*	Februari s/d Mei 2026

Pelaksanaan FKP tahun 2026 ini membahas 3 (tiga) standar pelayanan dari 38 standar pelayanan yang dimiliki BKK Kelas I Bandung, yang tahun sebelumnya juga telah membahas 2 (dua) standar pelayanan saat diselenggarakan FKP tahun 2025. Jadi standar pelayanan yang telah dibahas melalui FKP yaitu berjumlah 5 (lima) standar pelayanan dari jumlah 38 standar pelayanan yang dimiliki BKK Kelas I Bandung, yaitu sebagai berikut:

1) Standar pelayanan vaksinasi pelayanan vaksinasi internasional
2) Standar pelayanan penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT)
3) standar pelayanan penerbitan dokumentasi sertifikat vaksinasi internasional ICV/E-ICV
4) Standar pelayanan pemeriksaan kesehatan (ketiga) di embarkasi
5) Standar pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kakarantinaan kapal

Standart pelayanan yang dimiliki BKK Kelas I Bandung tersebut di SK kan dan dibuatkanlah Maklumat pelayanan, selanjutnya standart pelayanan dan maklumat pelayanan dipublikasi melalui media cetak dan media massa.

